

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Melalui Pendekatan Value for Money Tahun 2022-2024

Restania Oktavia¹ Nia Adelina Br Sembiring² Eka Grisanna Sihite³ Putri Kemala Dewi Lubis⁴ Khairani Alawiyah Matondang⁵

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: restaniaoktavia48@gmail.com¹ niaadelina6@gmail.com² ekasihite08@gmail.com³ putrikemala@unimed.ac.id⁴ alawiyah@unimed.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Deli Serdang Regency Government using the Value for Money (VFM) approach, which encompasses economic, efficiency, and effectiveness aspects. As one of the regencies with the largest regional budget (APBD) in North Sumatra, reaching Rp4.8 trillion in 2024, Deli Serdang faces challenges in optimizing local own-source revenue (PAD) as reported by local media regarding PAD realization which only reached 61.61% until early December 2024. This research is quantitative descriptive in nature using secondary data in the form of the Budget Realization Reports of Deli Serdang Regency for 2022–2024 obtained from the DJPK Ministry of Finance portal. The analysis technique employs the calculation of economic ratio (comparison of expenditure realization with expenditure budget), efficiency ratio (comparison of expenditure realization with revenue realization), and effectiveness ratio (comparison of PAD realization with PAD target). The results show that the financial performance of Deli Serdang Regency experienced fluctuations. From the economic aspect, 2022 was classified as uneconomical (103.44%), but improved to very economical in 2023 (83.58%) and 2024 (85.49%). From the efficiency aspect, 2022 was inefficient (100.04%), while 2023 (99.06%) and 2024 (96.21%) achieved efficient categories. Meanwhile, from the effectiveness aspect of PAD, for three consecutive years it remained in the less effective category, namely 70.41% (2022), 63.98% (2023), and 71.00% (2024). The main finding of this study is the paradox between success in expenditure savings (economic and efficient) and failure to achieve revenue targets (low effectiveness). This indicates that regional financial management focuses more on the expenditure side, while optimization of PAD potential has not been optimal. The Deli Serdang Regency Government is advised to evaluate the method of determining PAD targets to be more realistic and to conduct intensification and extensification of local tax and retribution collection.

Keywords: Value For Money, Economic, Efficiency, Effectiveness, Regional Financial Performance, APBD, Deli Serdang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan Value for Money (VFM) yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Sumatera Utara yang mencapai Rp4,8 triliun pada tahun 2024, Deli Serdang menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diberitakan media lokal mengenai realisasi PAD yang hanya mencapai 61,61% hingga awal Desember 2024. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 yang diperoleh dari portal DJPK Kemenkeu. Teknik analisis menggunakan perhitungan rasio ekonomis (perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja), rasio efisiensi (perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan), dan rasio efektivitas (perbandingan realisasi PAD dengan target PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi. Dari aspek ekonomis, tahun 2022 tergolong tidak ekonomis (103,44%), namun membaik menjadi sangat ekonomis pada tahun 2023 (83,58%) dan 2024 (85,49%). Dari aspek efisiensi, tahun 2022 tidak efisien (100,04%), sedangkan tahun 2023 (99,06%) dan 2024 (96,21%) telah mencapai kategori efisien. Adapun dari aspek efektivitas PAD, selama tiga tahun berturut-turut berada pada kategori kurang efektif,

yakni 70,41% (2022), 63,98% (2023), dan 71,00% (2024). Temuan utama penelitian ini adalah adanya paradoks antara keberhasilan penghematan belanja (ekonomis dan efisien) dengan kegagalan pencapaian target pendapatan (efektivitas rendah). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih terfokus pada sisi belanja, sementara optimalisasi potensi PAD belum berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disarankan untuk mengevaluasi metode penetapan target PAD agar lebih realistis serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Kinerja Keuangan Daerah, APBD, Deli Serdang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Era reformasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Paradigma lama yang berfokus pada penyerapan anggaran bergeser menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented government). Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memiliki hak untuk mengetahui tidak hanya berapa banyak dana yang dibelanjakan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja keuangan menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Salah satu pendekatan yang komprehensif untuk mengukur kinerja keuangan adalah Value for Money (VFM). Konsep yang bersumber dari praktik sektor publik di Inggris ini mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas—yang kemudian dikenal dengan istilah 3E (Mahmudi, 2019). Ekonomis berkaitan dengan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah (hemat). Efisiensi mengukur hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (tepat cara). Sedangkan efektivitas mengukur sejauh mana hasil (outcome) yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan (tepat sasaran). Ketiga aspek ini saling terkait dan memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pengelolaan keuangan suatu entitas publik.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten dengan kontribusi ekonomi terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.241,68 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, serta berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Posisi strategis ini menjadikan Deli Serdang sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan potensi pendapatan yang besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengelola dana publik yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari portal DJPK Kemenkeu, APBD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai Rp4,8 triliun (setelah dibulatkan dari Rp4.843.679.009.554). Besaran anggaran ini menempatkan Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Sumatera Utara. Konsekuensinya, tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut menjadi semakin tinggi, baik dari masyarakat, DPRD, maupun instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Namun demikian, berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah masih dihadapi. Pemberitaan media lokal (Tribun Medan, 6 Desember 2024) menyoroti bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang hingga awal Desember 2024 baru mencapai Rp816,3 miliar atau 61,61% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi

menyebabkan defisit anggaran jika tidak segera diantisipasi. Realisasi PAD yang rendah mengindikasikan adanya permasalahan dalam pencapaian target pendapatan, baik dari sisi penetapan target yang terlalu optimistis maupun dari sisi optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Fenomena rendahnya realisasi PAD ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan kinerja belanja daerah. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah daerah telah mengelola belanjanya secara ekonomis dan efisien di tengah keterbatasan pencapaian pendapatan. Bagaimana keseimbangan antara sisi penerimaan dan pengeluaran? Apakah belanja daerah mampu menghasilkan output yang optimal meskipun pendapatan tidak mencapai target? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi perlunya analisis kinerja keuangan dengan pendekatan Value for Money. Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penerapan VFM di berbagai pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Dwirandra (2019) pada Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pendekatan VFM efektif untuk menilai kinerja keuangan daerah secara komprehensif. Sementara itu, penelitian Purnama dan Wirasedana (2020) di Provinsi Bali menemukan bahwa penerapan VFM berkorelasi positif dengan akuntabilitas publik. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan periode waktu 5-10 tahun dan dilakukan di daerah dengan karakteristik yang berbeda dengan Deli Serdang.

Penelitian ini mengambil periode tahun 2022–2024 dengan pertimbangan ketersediaan data dan relevansi dengan isu terkini. Periode ini mencakup masa transisi pasca pandemi COVID-19 di mana pemerintah daerah mulai menyesuaikan kembali kebijakan fiskalnya. Selain itu, data tahun 2024 merupakan data terbaru yang mencerminkan kondisi aktual kinerja keuangan Deli Serdang. Meskipun periode tiga tahun relatif pendek, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai tren kinerja keuangan dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan periode yang lebih panjang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik di masa mendatang.

Tinjauan Teoritis

Konsep Value For Money

Value for Money (VFM) atau nilai guna anggaran merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) (Mardiasmo, 2002). Konsep ini lahir sebagai tuntutan baru atas transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik saat menjalankan aktivitasnya. Menurut Mardiasmo (2002), Value for Money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen pokok, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendapat serupa dikemukakan oleh Mahmudi (2015) yang mendefinisikan VFM sebagai konsep yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang, di mana pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan atau program dalam organisasi. Nordiawan dan Hertianti (2010) memberikan perspektif yang lebih berorientasi pada masyarakat, dengan menyatakan bahwa VFM adalah indikator yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai bagi masyarakat. Sementara itu, Ardila (2015) menekankan bahwa penilaian VFM tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga ditinjau dari aspek non-keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Manfaat Penerapan Value for Money Penerapan konsep VFM dalam organisasi sektor publik memberikan berbagai manfaat,

antara lain (Mardiasmo, 2002): Meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan public, Menurunkan biaya pelayanan publik karena adanya efisiensi serta penghematan dari inpu, Mengarahkan alokasi belanja berorientasi pada kepentingan public, Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik demi akuntabilitas.

Tiga Elemen Pokok Value for Money

Tiga elemen pokok dalam konsep Value for Money adalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang sering disebut dengan 3E (Mahmudi, 2015). Ketiga elemen ini saling terkait dan memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pengelolaan keuangan suatu entitas public.

Ekonomi (Economy)

Ekonomi adalah perbandingan antara masukan (input) yang terjadi dengan nilai masukan yang seharusnya. Secara prinsip, ekonomi berarti memperoleh input dengan kualitas serta kuantitas tertentu pada harga yang terendah (hemat) (Mahmudi, 2015). Ekonomi berhubungan dengan sejauh mana suatu organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya yang digunakannya dengan cara menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau boros.

Rumus Rasio Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Ekonomis

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat ekonomis (Mahmudi, 2015) adalah sebagai berikut:

- <90% : Sangat Ekonomis
- 90% -100% : Ekonomis
- 100% : Tidak Ekonomis (boros)
- Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi adalah pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan input tertentu, atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu (Mardiasmo, 2002). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Efisiensi

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi (Mahmudi, 2015) adalah sebagai berikut:

- < 90% : Sangat Efisien
- 90% - 100% : Efisien
- 100% : Tidak Efisien (defisit)
- Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program berdasarkan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan antara outcome (hasil) dengan output (keluaran).

Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Efektivitas

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas (Mahmudi, 2015) adalah sebagai berikut:

- 100% : Sangat Efektif
- 90% - 100% : Efektif
- 75% - 90% : Cukup Efektif
- <75% : Kurang Efektif

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya, dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat (Halim, 2012). Sumber-Sumber Keuangan Daerah Dalam kerangka desentralisasi fiskal, sumber- sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) – sumber pendapatan yang berasal dari potensi internal daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
- Dana Perimbangan atau Dana Transfer – dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- Pendapatan Lain-lain yang Sah – pendapatan selain PAD dan dana perimbangan, seperti hibah, dana darurat, dan lain-lain.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Sari dan Dwirandra (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pendekatan Value for Money	Kuantitatif deskriptif	Pendekatan VFM efektif untuk menilai kinerja keuangan daerah Secara komprehensif
2	Purnama dan Wirasedana (2020)	Pengaruh Penerapan Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik di Provinsi Bali	Kuantitatif asosiatif	Penerapan Value for Money berkorelasi positif dengan akuntabilitas publik
3	Prasetyo (2021)	Analisis Value for Money pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2019	Kuantitatif deskriptif	Terjadi peningkatan kinerja keuangan dari aspek efisiensi namun efektivitas PAD masih fluktuatif
4	Wijaya dan Suputra (2022)	Penerapan Konsep Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bali	Kuantitatif deskriptif	Sebagian besar kabupaten/kota di Bali telah ekonomis dan efisien namun efektivitas PAD masih perlu ditingkatkan

Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 dengan menggunakan tiga rasio Value for Money (ekonomis, efisiensi, efektivitas PAD)

untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah, yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada dengan menggunakan data numerik (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menganalisis data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Sumatera Utara yang memiliki dinamika keuangan menarik untuk dikaji.
3. Jenis dan Sumber Data. Jenis Data: Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka keuangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang. Sumber Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id>.
4. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, 2023, dan 2024 yang dipublikasikan oleh DJPK Kemenkeu.
5. Definisi Operasional Variabel. Variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Variabel	Definisi	Rumus	Skala
Ekonomis	Perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja	$(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$	Rasio
Efisiensi	Perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan	$(\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$	Rasio
Efektivitas PAD	Perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD	$(\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$	Rasio

6. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dengan pendekatan Value for Money, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024
 - b. Menyusun data dalam tabel ringkasan yang memuat Target PAD, Realisasi PAD, Anggaran Belanja, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pendapatan
 - c. Menghitung rasio ekonomis dengan rumus: $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$
 - d. Menghitung rasio efisiensi dengan rumus: $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$
 - e. Menghitung rasio efektivitas PAD dengan rumus: $(\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$
 - f. Menginterpretasikan hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan
 - g. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.241,68 km² dan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, sehingga menjadikannya daerah penyangga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan potensi pendapatan yang besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengelola dana publik yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari portal DJPK Kemenkeu, APBD Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai Rp4,84 triliun, menjadikannya salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Sumatera Utara. Data Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang (2022, 2023, 2024), setelah diekstraksi dan dibulatkan ke miliar rupiah terdekat. Berdasarkan pengumpulan data sekunder dari Portal SIKD DJPK Kemenkeu, berikut adalah ringkasan data keuangan Kabupaten Deli Serdang yang digunakan dalam analisis ini:

Komponen	2022	2023	2024
Target Pendapatan Daerah	1.479,4 M	1.538,0 M	1.646,9 M
Realisasi Pendapatan Daerah	1.041,7 M	984,0 M	1.169,4 M
Anggaran Belanja	4.229,5 M	4.356,8 M	4.988,8 M
Realisasi Belanja	4.373,1 M	3.675,6 M	4.433,0 M
Realisasi Pendapatan	4.373,1 M	3.675,6 M	4.433,0 M

Sumber: DJPK Kemenkeu (data diolah)

Hasil Analisis Value for Money

Analisis Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis mengukur tingkat kehematan belanja daerah dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Hasil perhitungan rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Realisasi Belanja	Rp. 4.379,9 M	Rp. 3.641,2 M	Rp. 4.265,0 M
Anggaran Belanja	Rp. 4.229,5 M	Rp. 4.356,8 M	Rp. 4.988,8 M
Rasio Ekonomis	103,44%	83,58%	85,49%
Kriteria	Tidak Ekonomis	Sangat Ekonomis	Sangat Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rasio ekonomis belanja daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022, realisasi belanja mencapai 103,44% dari anggaran, yang berarti pemerintah daerah membelanjakan dana melebihi pagu yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tambahan belanja di luar perencanaan awal, atau kemungkinan adanya kegiatan mendesak yang memerlukan alokasi dana tambahan. Memasuki tahun 2023, kinerja ekonomis membaik drastis dengan rasio 83,58%, masuk kategori sangat ekonomis. Artinya, pemerintah daerah berhasil menghemat belanja sebesar 16,42% dari anggaran yang tersedia. Tren positif ini berlanjut di tahun 2024 dengan rasio 85,49% yang masih sangat ekonomis. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan upaya efisiensi pasca pandemi serta pengendalian belanja yang lebih ketat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Realisasi Belanja	Rp. 4.374,9 M	Rp. 3.641,2 M	Rp. 4.265,0 M
Realisasi Pendapatan	Rp. 4.373,1 M	Rp. 3.675,6 M	Rp. 4.433,0 M
Rasio Efisiensi	100,04%	99,06%	96,21%
Kriteria	Tidak Efisien	Efisien	Efisien

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa tahun 2022 rasio efisiensi mencapai 100,04% yang berarti belanja hampir sama persis dengan pendapatan, bahkan sedikit melampaui (defisit tipis). Kondisi ini kurang ideal karena tidak menyisakan ruang untuk pembiayaan investasi atau dana cadangan. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dengan rasio berturut-turut 99,06% dan 96,21%, keduanya masuk kategori efisien. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah mampu menutupi belanja dengan lebih baik, bahkan menyisakan surplus yang dapat dialokasikan untuk pembangunan. Pada tahun 2024, terdapat selisih positif (surplus) sebesar Rp168 miliar antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Realisasi PAD	Rp. 1.041,7 M	Rp. 984,0 M	Rp. 1.169,4 M
Target PAD	Rp. 1.479,4 M	Rp. 1.538,0 M	Rp. 1.646,9 M
Rasio Efektivitas	70,41%	63,98 %	71,00%
Kriteria	Kurang efektif	Kurang efektif	Kurang efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Aspek paling kritis dalam kinerja keuangan Deli Serdang selama periode penelitian adalah efektivitas PAD. Sepanjang 2022-2024, realisasi PAD tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2022 hanya tercapai 70,41%, turun menjadi 63,98% di 2023, dan sedikit naik menjadi 71,00% di 2024. Ketiganya masuk kategori "Kurang Efektif" (<75%). Rendahnya realisasi PAD ini patut menjadi perhatian serius. Target yang ditetapkan mungkin terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan kapasitas riil ekonomi daerah. Alternatifnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah belum optimal. Temuan ini sejalan dengan pemberitaan media lokal (Tribun Medan, 6 Desember 2024) yang menyoroti rendahnya realisasi PAD Deli Serdang yang hanya mencapai 61,61% hingga awal Desember 2024, mengancam potensi defisit anggaran.

Rekapitulasi Hasil Analisis Value for Money

Rekapitulasi hasil analisis Value for Money Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tahun	2022		2023		2024	
Ekonomis	Tidak (103,44%)	Ekonomis	Sangat (83,58%)	Ekonomis	Sangat (85,49%)	Ekonomis
Efisiensi	Tidak (100,04%)	Efisien	Efisien (99,06%)		Efisien (96,21%)	
Efektivitas PAD	Kurang (70,41%)	Efektif	Kurang (63,98%)	Efektif	Kurang (71,00%)	Efektif
Kinerja Umum	Buruk		Sedang		Sedang	

Pembahasan

Paradoks Efisiensi vs Efektivitas

Temuan utama penelitian ini adalah adanya paradoks antara keberhasilan penghematan belanja (ekonomis dan efisien) dengan kegagalan pencapaian target pendapatan (efektivitas rendah). Pada tahun 2023-2024, pemerintah berhasil hemat belanja (ekonomis & efisien) namun gagal memenuhi target pendapatan (efektivitas rendah). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih terfokus pada sisi belanja, sementara optimalisasi potensi PAD belum berjalan optimal. Kondisi ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa ketiga elemen VFM harus berjalan beriringan. Organisasi dapat saja efisien secara operasional tetapi gagal memberikan dampak yang diharapkan jika efektivitas rendah. Dalam konteks Deli Serdang, keberhasilan mengendalikan belanja tidak diimbangi dengan keberhasilan meningkatkan pendapatan, sehingga potensi pembangunan daerah tidak dapat dioptimalkan.

Konsistensi Masalah PAD

Selama tiga tahun berturut-turut, efektivitas PAD Kabupaten Deli Serdang konsisten berada di bawah 75% (kategori kurang efektif). Ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah:

1. Target PAD yang terlalu ambisius, penetapan target mungkin tidak didasarkan pada potensi riil dan data historis yang akurat
2. Basis pajak dan retribusi belum tergali optimal, masih terdapat potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal
3. Kepatuhan wajib pajak yang rendah, kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan
4. Efektivitas pemungutan yang lemah, sistem dan prosedur pemungutan mungkin belum berjalan efisien

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat temuan Sari dan Dwirandra (2019) bahwa pendekatan VFM efektif untuk menilai kinerja keuangan daerah secara komprehensif. Penelitian ini juga mendukung pernyataan Mahmudi (2015) bahwa pengukuran kinerja sektor publik tidak cukup hanya pada aspek ekonomi dan efisiensi, tetapi harus mencakup efektivitas. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan sinyal kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap proses penetapan target PAD. Target yang terlalu tinggi tanpa didukung strategi pencapaian yang memadai justru akan menciptakan ilusi perencanaan dan berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan Value for Money tahun 2022-2024, dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomis dan efisiensi belanja daerah menunjukkan perbaikan signifikan. Pada tahun 2022, rasio ekonomis berada pada kategori tidak ekonomis (103,44%) dan rasio efisiensi tidak efisien (100,04%), namun pada tahun 2023 dan 2024 berhasil membaik menjadi sangat ekonomis (83,58% dan 85,49%) serta efisien (99,06% dan 96,21%). Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mampu melakukan penghematan belanja dan mengendalikan defisit anggaran, bahkan pada tahun 2024 berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp168 miliar. Sebaliknya, aspek efektivitas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang memprihatinkan karena selama tiga tahun berturut-turut berada pada kategori kurang efektif, dengan rincian tahun 2022 sebesar 70,41%, tahun 2023 sebesar 63,98%, dan tahun 2024 sebesar 71,00%. Realisasi PAD tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya masalah struktural dalam perencanaan dan optimalisasi pendapatan daerah. Temuan ini sejalan dengan pemberitaan media lokal yang menyoroti rendahnya realisasi PAD Deli Serdang yang hanya mencapai 61,61% hingga awal Desember 2024 dan mengancam potensi defisit anggaran. Temuan utama penelitian ini adalah adanya paradoks antara keberhasilan penghematan belanja (aspek ekonomis dan efisiensi yang membaik) dengan kegagalan pencapaian target pendapatan (efektivitas rendah). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih terfokus pada sisi belanja, sementara optimalisasi potensi PAD belum berjalan optimal. Kondisi ini membawa implikasi bahwa perbaikan tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara simultan pada sisi pendapatan dan belanja, bukan parsial pada salah satu aspek saja.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengevaluasi metode penetapan target PAD agar lebih realistis dan berbasis pada potensi riil daerah melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan sistem administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi, penilaian, dan kerjasama pemanfaatan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi aset terhadap PAD. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengendalian belanja yang telah berhasil dilakukan, dengan tetap menerapkan prinsip hemat, tepat guna, dan tepat sasaran dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Koordinasi yang lebih intensif dengan DPRD dan seluruh OPD penghasil pendapatan perlu dibangun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pencapaian target PAD. Keberhasilan dalam aspek ekonomis dan efisiensi belanja harus diimbangi dengan keberhasilan serupa di sisi pendapatan agar tercipta keseimbangan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian menjadi minimal 5-10 tahun agar dapat melihat tren jangka panjang kinerja keuangan daerah secara lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menambahkan aspek lain seperti pemerataan (equity), kualitas pelayanan publik, atau kepuasan masyarakat sebagai variabel tambahan untuk melengkapi analisis Value for Money. Penggunaan metode kualitatif atau campuran (mixed method) melalui wawancara dengan pihak terkait juga direkomendasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya efektivitas PAD, serta studi komparatif antar kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja keuangan Kabupaten Deli Serdang dibanding daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdagri. 1996. Kepmendagri No.690.900.327, 1996. *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabet. Bandung
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, A. (2021). Analisis Value for Money pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 112-125.
- Purnama, I G. A. dan Wirasedana, I W. (2020). Pengaruh Penerapan Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(3), 1456-1475.
- Sari, N. K. dan Dwirandra, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pendekatan Value for Money. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1), 88-97.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, F. 2007. *Strategi Pemasaran*. Edisi Pertama. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Tribun Medan. (2024, 6 Desember). Realisasi PAD Deli Serdang Baru 61,61 Persen, Ancam Defisit Anggaran. *Tribun Medan*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, K. dan Suputra, I D. (2022). Penerapan Konsep Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bali. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(1), 45-58.
- World Bank Institute. (2013). *Value for Money Analysis in Public-Private Partnerships*. Washington DC: World Bank.